



Minta Dana Hibah Tak Dipolitisasi

MANTAN anggota DPRD Ketapang, periode 2019-2024, Abdul Sani, meminta agar dana hibah tidak digunakan untuk kepentingan politik.

Dana hibah tahun 2024 yang mencapai Rp81 miliar diharapkan bisa benar-benar disalurkan untuk kepentingan masyarakat.

"Saya mengingatkan seluruh pihak untuk tidak menyalahgunakan bantuan hibah yang nilainya sangat fantastis menjelang Pilkada Ketapang," kata Sani.

Dia menjelaskan, jika dilihat dari data sebelumnya dana hibah tahun 2024 yang bersumber dari APBD Ketapang, nilainya sangat besar yang mencapai Rp81 miliar. "Tentu wajar jika harus kita awasi penyaluran dan pemanfaatannya," jelasnya. Dia menilai, bantuan hibah sering dijadikan alat politik dalam momen Pilkada. Oleh karena itu, dia mengingatkan Kabag Kesra beserta jajaran untuk tidak menyalahgunakan wewenang.

"Penerima hibah rentan dimanfaatkan dan diarahkan. Saya harap informasi ini juga tidak benar," tegasnya.

Sementara itu, Kabag Kesra Ketapang, Munizar, mengatakan bantuan hibah yang jumlahnya mencapai Rp81 miliar dan menjadi yang terbesar dari tahun-tahun sebelumnya, sama sekali tidak ada kepentingan politik atau arah dukungan dalam Pilkada.

"Kami ini PNS juga khawatir kalau terjadi apa-apa bisa diproses secara hukum," katanya.

Dia menegaskan, selama ini pihaknya bekerja sesuai prosedur dan mekanisme, termasuk dalam penyaluran dana hibah. Pihaknya hanya mengurus administrasi, sedangkan dana hibah langsung masuk ke rekening pengurus atau penerima. Munizar juga menegaskan, informasi soal permintaan fee dari dana hibah, hal tersebut tidak benar.

"Tapi biasa lah, informasi di luar kalau orang mau menjatuhkan itu bisa saja, tapi kami dari Kesra tidak boleh menanggapi," ujarnya.

Berkaitan dengan informasi soal pengurusan laporan pertanggungjawaban dana hibah oleh para penerima, Munizar mengaku jika pihaknya sama sekali tidak pernah mengakomodir pembuatan SPJ. Apalagi pembuatan SPJ menjadi tanggung jawab penerima hibah dan sudah dijelaskan tatacara penyampaian.

"Sebelum dapat hibah, mereka sudah dijelaskan bahwa SPJ hibah tidak seperti SPJ di pemerintahan.

Mereka cukup memenuhi standar minimal seperti ada BKO, nota dengan cap toko, kwitansi san foto-foto nyata kegiatan," jelasnya. (afi)